



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan di setiap tahun anggaran. Pada tahun 2022 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2022.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 25. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

40. Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rancangan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan Tahun 2022 yang merujuk pada Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2024 guna terwujudnya efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan. Dengan penyusunan Rancangan Renja Perubahan diharapkan terjadi sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan OPD dan penyesuaian prioritas kerja Rancangan Renja Perubahan OPD dengan plafon anggaran/pagu dana OPD yang termuat dalam APBD.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2022 :

1. Adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
2. Pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2022, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah sampai Triwulan II Tahun 2022
- BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022
3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2022
3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2022

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2022, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Sampai dengan akhir bulan Triwulan II Mei tahun 2022 penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pekerjaan yang proses pengajuan administrasi pembayarannya pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Adapun Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah.

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) Murni | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) Murni | | | |
|------|---|--|-----------------------|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----|---|---------|---|----------------------|------------|------------|
| | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | | | | 10=6+7+8+9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | (%) | RP. (%) | | | |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 6 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 6 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Skor | 80.01 | 6,946,939,000 | 0 | 987,117,159 | 0 | 2,183,223,006 | | | | 0 | 3,170,340,165 | 0% | 46% |
| 2 | 1 6 | 1 | 2 · 0 1 | Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah | % | 100 | 115,000,000 | 25 | 0 | 25 | 136,5 | | | | 50 | 136,5 | 50% | 0% |
| 2 | 1 6 | 1 | 2 · 0 1 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Doc | 10 | 115,000,000 | 2 | 0 | 2 | 136,5 | | | | 4 | 136,5 | 40% | 0% |
| 2 | 1 6 | 1 | 2 · 0 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan | % | 100 | 3,783,741,000 | 25 | 560,586,343 | 25 | 1,556,300,105 | | | | 50 | 2,116,886,448 | 50% | 56% |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10=6+7+8+9 | | 11=10/5 x 100% | |
|---|---|---|---|---|---|--|-------|------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---|----|---|----|------------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K (%) | RP. (%) |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah | % | 100 | 3,783,741,000 | 25 | 560,586,343 | 25 | 1,556,300,105 | | | | | 50 | 2,116,886,448 | 50% | 56% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian | % | 100 | 1,000,000,000 | 20 | 0 | 25 | 282,448,500 | | | | | 45 | 282,448,500 | 45% | 28% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan | Paket | 1 | 1,000,000,000 | 1 | 0 | 1 | 282,448,500 | | | | | 2 | 282,448,500 | 200% | 28% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum | % | 100 | 200,000,000 | 25 | 63,172,910 | 25 | 47,657,330 | | | | | 50 | 110,830,240 | 50% | 55% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas | % | 100 | 200,000,000 | 25 | 63,172,910 | 25 | 47,657,330 | | | | | 50 | 110,830,240 | 50% | 55% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah | % | 100 | 1,228,338,000 | 25 | 212,770,878 | 25 | 243,315,569 | | | | | 50 | 456,086,447 | 50% | 37% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif | % | 100 | 1,228,338,000 | 25 | 212,770,878 | 25 | 243,315,569 | | | | | 50 | 456,086,447 | 50% | 37% |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10=6+7+8+9 | | 11=10/5 x 100% | |
|---|---|---|---|----|---|--|---|-----|---------------|----|-------------|----|---------------|---|-----|---|-----|------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | RP. (%) |
| 2 | 1 | 1 | 2 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan | % | 100 | 619,860,000 | 25 | 150,587,028 | 25 | 53,365,002 | | | | | 50 | 203,952,030 | 50% | 33% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan | % | 100 | 150,500,000 | 25 | 25,765,200 | 25 | 31,844,890 | | | | | 50 | 57,610,090 | 50% | 38% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase gedung kantor yang layak digunakan | % | 100 | 132,500,000 | 25 | 70,109,828 | 25 | 9,754,287 | | | | | 50 | 79,864,115 | 50% | 60% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase peralatan sarana dan prasarana gedung dan kantor yang layak digunakan | % | 100 | 336,860,000 | 25 | 54,712,000 | 25 | 11,765,825 | | | | | 50 | 66,477,825 | 50% | 20% |
| 2 | 1 | 2 | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik | % | 77 | 4,789,955,000 | 0 | 552,598,080 | 0 | 1,186,330,792 | | | | | 0 | 1,738,928,872 | 0% | 36% |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10=6+7+8+9 | | 11=10/5 x 100% | |
|---|---|---|---|----|---|--|----------------|------|---------------|-----|-------------|-----|---------------|---|-----|---|-----|------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | RP. (%) |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah | % | 100 | 4,789,955,000 | 100 | 552,598,080 | 100 | 1,186,330,792 | | | | | 200 | 1,738,928,872 | 200% | 36% |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa | Berita | 1200 | 2,289,955,000 | 344 | 252,250,000 | 297 | 593175448 | | | | | 641 | 845,425,448 | 53% | 37% |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah | Media | 5 | 1,500,000,000 | 5 | 184,522,080 | 5 | 351371124 | | | | | 10 | 535,893,204 | 200% | 36% |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti | % | 100 | 250,000,000 | 100 | 34,495,000 | 100 | 41133795 | | | | | 200 | 75,628,795 | 200% | 30% |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif | Kelompok | 27 | 300,000,000 | 27 | 31,420,000 | 27 | 44416125 | | | | | 54 | 75,836,125 | 200% | 25% |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Kegiatan | Paket | 1 | 100,000,000 | 1 | 0 | 1 | 74739500 | | | | | 2 | 74,739,500 | 200% | 75% |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat | Tema Informasi | 6 | 350,000,000 | 2 | 49,911,000 | 2 | 81494800 | | | | | 4 | 131,405,800 | 67% | 38% |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10=6+7+8+9 | | 11=10/5 x 100% | |
|---|---|---|---|------------------|---|---|--------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|---|-----|---|-----|------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | RP. (%) |
| 2 | 1 | 6 | 3 | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 100 | 10,587,483,000 | 25 | 1,523,757,278 | 25 | 2,476,133,729 | | | | | 50 | 3,999,891,007 | 50% | 38% |
| 2 | 1 | 6 | 3 | 2 · 0 1 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase OPD pengguna domain.id | % | 100 | 5,100,000,000 | 25 | 796,112,672 | 25 | 1,185,154,242 | | | | | 50 | 1,981,266,914 | 50% | 39% |
| 2 | 1 | 6 | 3 | 2 · 0 1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun | Domain | 238 | 100,000,000 | 238 | 19,714,000 | 238 | 0 | | | | | 238 | 19,714,000 | 100% | 20% |
| 2 | 1 | 6 | 3 | 2 · 0 1 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat | Titik | 1750 | 5,000,000,000 | 1550 | 776,398,672 | 1650 | 1185154242 | | | | | 1650 | 1,961,552,914 | 177% | 39% |

| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10=6+7+8+9 | | 11=10/5 x 100% | |
|---|---|---|---|--|--|-----------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|---|-----|---|-----|------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | RP. (%) |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah | % | 100 | 5,487,483,000 | 25 | 727,644,606 | 25 | 1,290,979,487 | | | | | 50 | 2,018,624,093 | 50% | 37% |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola | Paket | 1 | 3,978,005,000 | 1 | 521,925,841 | 1 | 994,045,242 | | | | | 2 | 1,515,971,083 | 200% | 38% |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah titik Client | Titik | 180 | 400,000,000 | 180 | 121,477,490 | 180 | 79,082,590 | | | | | 360 | 200,560,080 | 200% | 50% |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi | Aplikasi | 7 | 460,000,000 | 1 | 25,841,275 | 2 | 120,651,655 | | | | | 3 | 146,492,930 | 43% | 32% |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi | Paket | 1 | 302,553,000 | 1 | 17,500,000 | 1 | 33,000,000 | | | | | 2 | 50,500,000 | 200% | 17% |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city | % | 100 | 100,000,000 | 100 | 11,400,000 | 100 | 18,200,000 | | | | | 200 | 29,600,000 | 200% | 30% |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK | Komunitas | 4 | 186,000,000 | 4 | 29,500,000 | 4 | 46,000,000 | | | | | 8 | 75,500,000 | 200% | 41% |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10=6+7+8+9 | | 11=10/5 x 100% | |
|---|---|---|---|---|--|---|------------|-----|-------------|----|------------|----|------------|---|-----|---|-----|------------|------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | RP. (%) |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Sarana Information Center | Unit | 1 | 60,925,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | - | 100% | 0% |
| 2 | 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 100 | 500,000,000 | 25 | 36,862,000 | 25 | 24,601,000 | | | | | 50 | 61,463,000 | 50% | 12% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | Doc | 1 | 500,000,000 | 1 | 36,862,000 | 1 | 24,601,000 | | | | | 2 | 61,463,000 | 200% | 12% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Statistik | Doc | 1 | 295,000,000 | 1 | 10,572,000 | 1 | 13,145,000 | | | | | 2 | 23,717,000 | 200% | 8% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah Kegiatan | Paket | 1 | 55,000,000 | 1 | 26,290,000 | | 0 | | | | | 1 | 26,290,000 | 100% | 48% |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10=6+7+8+9 | | 11=10/5 x 100% | |
|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|------------|------------|--------------------|------------|------------------|----------|--------------------|---|-----|---|-----|------------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | RP. (%) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah dokumen metadata | Doc | 1 | 150,000,000 | 0 | 0 | 1 | 11,456,000 | | | | | 1 | 11,456,000 | 100% | 8% |
| 2 | 2 | 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi | % | 100 | 350,000,000 | 100 | 9,152,500 | | 104,972,750 | | | | | 100 | 114,125,250 | 100% | 33% |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan | JKS | 2 | 350,000,000 | 2 | 9,152,500 | 2 | 104,972,750 | | | | | 4 | 114,125,250 | 200% | 33% |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi | OPD | 34 | 50,000,000 | 0 | 0 | | 17,998,000 | | | | | 0 | 17,998,000 | 0% | 36% |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah berita sandi yang diamankan | Berita | 800 | 300,000,000 | 181 | 9,152,500 | 140 | 86,974,750 | | | | | 321 | 96,127,250 | 40% | 32% |

Tabel 2.1

Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II (dua) Tahun 2022

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah “Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik”

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah :

1. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Jaringan TIK, Sistem Informasi dan Layanan Publik Terintegrasi
4. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektor Perangkat Daerah yang Berkualitas
5. Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi

3.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai berikut :

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Indeks RB Perangkat Daerah | Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah oleh Inspektorat |
| 2 | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi |
| 3 | Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Jaringan TIK, Sistem Informasi dan layanan publik terintegrasi | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 4 | Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian |
| 5 | Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi | Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian | Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian |

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun

3.1.4 Rencana Kinerja Tahun 2022

Target Rencana Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--------------------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Indeks RB Perangkat Daerah | 27,01 |
| 2 | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 91 |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 3 | Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Jaringan TIK, Sistem Informasi dan layanan publik terintegrasi | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100% |
| 4 | Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100% |
| 5 | Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi | Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian | 100% |

Tabel 3.2
Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun

3.2 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

- 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.3 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

- 2.1.4 Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 2.1.5 Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 2.1.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Aplikasi Informatika

- 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 3.2 Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.2.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 3.2.3 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.2.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 3.2.5 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 3.2.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

- 3.2.7 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 4.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
 - 4.1.3 Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2022 dalam Tabel dibawah ini.

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | | | Sumber Dana | | | |
|------|---|--------------------|--------------------------|----------------|---|--|--|---|---|----------------|---------|----------------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 6 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | 22,322,427,000 | 27,891,484,578 | | |
| 2 | 1 6 | 0 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 6,946,339,000 | 8,841,488,768 | | |
| 2 | 1 6 | 0 1 | 2. 0 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 115,000,000 | 3,670,640 | | |
| 2 | 1 6 | 0 1 | 2. 0 1 | 0 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A Skor | A Skor | 20 dokumen | 20 dokumen | 32.02 skor | 32.02 skor | 115,000,000 | 3,670,640 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 2 | 1 6 | 0 1 | 2. 0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 3,783,741,000 | 5,446,382,124 | | |
| 2 | 1 6 | 0 1 | 2. 0 2 | 0 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A Skor | A Skor | 100 % | 100 % | 32.02 skor | 32.02 skor | 3,783,741,000 | 5,446,382,124 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|--|--|--|---|--|--------|--------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 2 | 1 | 0 | 2. | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | 999,400,000 | 1,390,537,900 | | | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A Skor | A Skor | 1 Paket | 1 Paket | 32.02 skor | 32.02 skor | 999,400,000 | 1,390,537,900 | DBH CHT |
| 2 | 1 | 0 | 2. | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | 200,000,000 | 300,000,000 | | | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A Skor | A Skor | 100 % | 100 % | 32.02 skor | 32.02 skor | 200,000,000 | 300,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2. | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | 1,228,338,000 | 1,049,271,454 | | | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A Skor | A Skor | 100 % | 100 % | 32.02 skor | 32.02 skor | 1,228,338,000 | 1,049,271,454 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2. | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | 619,860,000 | 651,626,650 | | | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A Skor | A Skor | 100 % | 100 % | 32.02 skor | 32.02 skor | 150,500,000 | 188,176,650 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|----------|---|--|--|---|---|--------|--------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Persentase gedung kantor yang layak digunakan | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A Skor | A Skor | 100 % | 100 % | 32.02 skor | 32.02 skor | 132,500,000 | 130,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Persentase peralatan sarana dan prasarana gedung dan kantor yang layak digunakan | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A Skor | A Skor | 100 % | 100 % | 32.02 skor | 32.02 skor | 336,860,000 | 332,950,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | | | | | | 4,788,605,000 | 5,580,504,230 | |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 4,788,605,000 | 5,580,504,230 | |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik | Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77 % | 77 % | 1200 berita | 1200 berita | 88.5 skor | 88.5 skor | 2,288,755,000 | 3,060,071,080 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik | Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77 % | 77 % | 5 media | 5 media | 88.5 skor | 88.5 skor | 1,438,697,000 | 1,591,212,490 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Pelayanan Informasi Publik | Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik | Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77 % | 77 % | 100 % | 100 % | 88.5 skor | 88.5 skor | 249,850,000 | 228,260,320 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|---|---|--|---|--------------------------------------|---|-------|-------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77 % | 77 % | 27 Kelompok | 27 Kelompok | 88.5 skor | 88.5 skor | 361,303,000 | 340,463,320 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 1 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik | Jumlah Kegiatan | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77 % | 77 % | 1 Paket | 1 Paket | 88.5 skor | 88.5 skor | 100,000,000 | 78,360,320 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 1 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik | Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77 % | 77 % | 6 Tema informasi | 6 Tema informasi | 88.5 skor | 88.5 skor | 350,000,000 | 282,136,700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | | | | | | 10,587,483,000 | 13,469,491,580 | |
| 2 | 1 | 0 | 2. | | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 5,100,000,000 | 4,970,829,940 | |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 238 domain | 238 domain | 3.35 skor | 3.35 skor | 100,000,000 | 90,259,830 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|----------|--|---|---|------------------------------|---|----------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyelenggaraa n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1750 titik | 1750 titik | 3.35 skor | 3.35 skor | 5,000,000,000 | 4,880,570,110 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 5,487,483,000 | 8,498,661,640 | |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penatalaksana an dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 paket | 1 paket | 3.35 skor | 3.35 skor | 3,978,000,000 | 4,664,156,640 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2. | 0 | Penyelenggaraa n Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah titik Client | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 180 titik | 180 titik | 3.35 skor | 3.35 skor | 400,000,000 | 1,100,350,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---------------------------|---|-------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah Aplikasi | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 Aplikasi | 7 Aplikasi | 3.35 skor | 3.35 skor | 460,000,000 | 1,089,190,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 paket | 1 paket | 3.35 skor | 3.35 skor | 302,558,000 | 768,570,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 3.35 skor | 3.35 skor | 100,000,000 | 154,095,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 Komunitas | 4 Komunitas | 3.35 skor | 3.35 skor | 186,000,000 | 186,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---|
| 2 | 1 | 0 | 2. | 1 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah Sarana Information Center | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 unit | 1 unit | 3.35 skor | 3.35 skor | 60,925,000 | 536,300,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 2 | 2 | 0 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | 499,250,000 | 290,000,000 | |
| 2 | 2 | 0 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | | | | | | 499,250,000 | 290,000,000 | |
| 2 | 2 | 0 | 2. | 0 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 499,250,000 | 290,000,000 | |
| 2 | 2 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Statistik | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 3.35 skor | 3.35 skor | 294,850,000 | 200,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 2 | 0 | 2. | 0 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Kegiatan | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 paket | 1 paket | 3.35 skor | 3.35 skor | 55,000,000 | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen metadata | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 3.35 skor | 3.35 skor | 149,400,000 | 40,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | |
| 2 | 2 | 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | 350,000,000 | 266,296,880 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | | | | | | 350,000,000 | 266,296,880 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 350,000,000 | 266,296,880 | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 7 OPD | 7 OPD | 3.35 skor | 3.35 skor | 50,000,000 | 108,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Jumlah berita sandi yang diamankan | Nilai Domain Layanan SPBE | Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 900 berita | 900 berita | 3.35 skor | 3.35 skor | 300,000,000 | 158,046,880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 23,171,677,000 | 28,447,781,458 | | | |

Tabel 3.3
Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2022 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dancita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**

**SUBAKRI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680904 198903 1 004**